

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Kebudayaan daerah yang merupakan faktor yang paling dominan mendorong berkembangnya kepariwisataan di daerah Bali, disamping faktor keindahan alamnya. Sistem kemasyarakatan di Bali dikenal dengan nama Desa Adat. Aturan mengenai Desa Adat tercantum dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Mengenai Desa Adat Di Bali, 2019. Desa Adat tidak hanya berperan di bidang sosial budaya dan keagamaan, namun juga memiliki peran yang penting di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Mengingat pembiayaan desa adat berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah, maka pemerintah membuat suatu upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, dengan membentuk Lembaga Perkreditan Desa (selanjutnya disebut LPD) pada tahun 1984 diseluruh Desa Adat di Bali.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. Keberadaan LPD terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan mengembangkan kebudayaan Bali sebagai aset bangsa. Kesuksesan LPD merupakan buah dari konsep pendirian dan pengelolaan LPD yang digali dari kearifan lokal dan kultural masyarakat Bali yang berbasis pada

kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan. Peranan LPD ini terutama tampak dalam pengelolaan asset desa adat, kemampuan LPD dalam memberikan kredit bagi usaha produktif krama desa adat dan memberikan bantuan terhadap aktivitas sosial di tingkat desa adat, misalnya pembangunan dan/atau pemeliharaan pura, dana ritual, dan sebagainya. Maksud dan tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, pemerataan perekonomian, membuka lapangan kerja dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali.

Namun, pada saat ini masih banyaknya LPD di Bali yang tidak beroperasi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan table 1.2 terkait dengan persentase jumlah LPD yang tidak beroperasi per Kabupaten:

Tabel 1.1
Persentase LPD Tidak Beroperasi Per Kabupaten Tahun 2020

No.	Kabupaten	Persentase LPD Tidak Beroperasi
1	Tabanan	15, 58%
2	Buleleng	13, 02%
3	Karangasem	11, 58%
4	Gianyar	7, 04%
5	Bangli	5, 03 %
6	Klungkung	4, 20%
7	Badung	4, 10 %
8	Denpasar	2,86%
9	Jembrana	0,00%

Sumber : (LP-LPD, 2020)

Tabel 1.2
Persentase LPD Tidak Beroperasi Per Kabupaten Tahun 2021

No	Kabupaten	Persentase LPD Tidak Beroperasi
1	Tabanan	13.59%
2	Buleleng	11.24%
3	Karangasem	8.42%
4	Gianyar	6.30%
5	Bangli	3.77%
6	Badung	3.28%
7	Klungkung	2.52%
8	Jembrana	1.56%
9	Denpasar	0.00%

Sumber : (LP-LPD Provinsi Bali, 2022)

Berdasarkan tabel data LPD yang tidak beroperasi per Kabupaten tahun 2020 dan 2021 bahwa Kabupaten Tabanan menempati posisi pertama yang dianggap memiliki persentase LPD yang tidak beroperasi dimana pada tahun 2020 sebesar 15,58% dan tahun 2021 sebesar 13,59%, sedangkan posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Buleleng dengan persentase LPD yang tidak beroperasi pada tahun 2020 sebesar 13,02% dan tahun 2021 sebesar 11.24%. Hal ini tentu saja memberikan citra buruk pada LPD Kabupaten Tabanan karena terus menempatin posisi pertama dalam tingkat kecurangan yang paling banyak. Berdasarkan wawancara bersama Bapak I Dewa Nym. Alit Astina, S.E., selaku Kapala LPLPD Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa :

“Banyaknya LPD yang bermasalah di Kabupaten Tabanan disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya pengawasan internal dan eksternal LPD itu sendiri, adanya konflik kepentingan dalam LPD, banyaknya kredit macet yang terjadi hampir disemua LPD, kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal LPD, potensi SDM yang masih kurang karena jumlah warga yang masih sedikit dalam desa adat, yang menyebabkan LPD lambat dan terkendala, terkendala dalam upah/gaji pegawai LPD, serta masih banyak pegawai yang kurang mengenal IT, potensi di beberapa desa ada yang

kurang mendukung dimana masih banyak desa yang mempunyai mata pencaharian bergantung pada musiman”

Adapun penyebab LPD tidak beroperasi disebabkan karena banyaknya

terjadi kasus kecurangan. Adapun data kasus kecurangan LPD di Bali periode 2018-

2022 yang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Data Kasus Kecurangan LPD Per Kabupaten Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Kasus Kecurangan	Keterangan
1.	Tabanan	LPD Adat Kota Tabanan (2022)	Kasus ini menyebabkan kerugian mencapai Rp1,2 miliar. (baliexpress.jawapos.com, 2022)
		LPD Belumbang (2018)	Kasus ini menyebabkan mengakibatkan kerugian hingga Rp 1,1 miliar (balitribune.co.id, 2022)
		LPD Sunantaya (2019)	Kasus ini menyebabkan kerugian mencapai Rp 1,233 miliar. (Tribunbali.com, 2020)
2.	Buleleng	LPD Desa Adat Anturan dan LPD Desa Adat Kalianget (2020)	Kasus LPD Kalianget mencapai kerugian Rp 355 juta. (NusaBali.com, 2020) dan (Jurnalpatrolinews.co.id., 2020).
		LPD Desa Adat Gerokgak dan LPD Desa Adat Sangsit (2019)	Kasus LPD Gerokgak mencapai kerugian Rp 1,264 miliar dan LPD Sangsit sebesar Rp 600 juta. (Kumpara.com, 2019)
3.	Karangasem	LPD Desa Adat Sega (2018)	Kasus ini menyebabkan kerugian senilai Rp 548.546.461 juta. (baliexpress.jawapos.com, 2018)
4.	Jembrana	LPD Desa Adat Tuwed (2018)	Kasus menyebabkan kerugian hingga 800 juta. (bali.tribunnews.com, 2019)
5.	Gianyar	LPD Desa Adat Pacung (2018)	Kasus ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 142 juta lebih. (bali.tribunnews.com, 2019)
6.	Badung	LPD Desa Adat Kapal (2019)	Kasus ini menyebabkan kerugian 1,7 miliar. (bali.tribunnews.com, 2019)
7.	Bangli	LPD Desa Adat Selat (2019)	Kasus ini menyebabkan kerugian sebesar Rp 225 juta. (bali.tribunnews.com, 2019)
8.	Klungkung	-	
9.	Denpasar	-	

Sumber : (Data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel kasus kecurangan diatas menunjukkan bahwa LPD di Kabupaten Tabanan merupakan LPD yang paling banyak terjadi kasus kecurangan dari tahun 2018-2022. Banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten

Tabanan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan LPD. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 dan table 1.5 mengenai data perkembangan LPD di Kabupaten Tabanan pada triwulan IV tahun 2020 hingga 2021.

Tabel 1.4
Data Perkembangan LPD Kabupaten Tabanan Triwulan IV Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah			Data Kesehatan					
		LP D	Asset (Rp 000)	Laba (Rp 000)	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Laporan
1	Baturiti	44	107.861.042	2.959.101	22	8	3	0	11	0
2	Kediri	21	416.905.262	9.132.950	11	6	2	2	0	0
3	Marga	28	244.926.667	4.284.436	15	3	5	0	5	0
4	Penebel	67	237.598.368	6.242.326	25	14	10	4	14	0
5	Kerambitan	27	234.714.311	3.292.534	13	7	2	4	1	0
6	Pupuan	24	116.922.230	3.309.455	17	2	0	1	4	0
7	Selemadeg	27	50.793.233	1.805.453	16	0	5	0	6	0
8	Selemadeg Barat	30	143.401.219	3.412.837	11	7	6	5	1	0
9	Selemadeg Timur	27	47.635.307	1.479.748	12	7	1	0	7	0
10	Tabanan	13	319.781.475	5.491.772	7	3	1	1	0	1
	Jumlah	308	1.920.539.114	41.410.612	149	57	35	17	49	1

Sumber : Data diolah dari LPLPD Kab. Tabanan, 2020

Tabel 1.5
Data Perkembangan LPD Kabupaten Tabanan Triwulan IV Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah			Data Kesehatan					
		LP D	Asset (Rp 000)	Laba (Rp 000)	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Laporan
1	Baturiti	44	110.759.223	3.073.127	17	11	5	0	9	
2	Kediri	21	415.816.319	8.306.476	7	5	7	2	0	
3	Marga	28	243.021.156	4.370.001	11	5	6	0	6	
4	Penebel	67	238.418.807	6.309.852	28	13	9	5	12	
5	Kerambitan	27	227.428.904	2.777.483	11	6	5	4	1	
6	Pupuan	24	125.875.116	3.385.705	17	3	0	1	2	
7	Selemadeg	27	55.030.505	1.700.941	14	2	5	0	6	
8	Selemadeg Barat	30	151.180.878	3.189.886	13	7	7	4	1	
9	Selemadeg Timur	27	50.496.589	1.400.887	12	4	6	0	6	
10	Tabanan	13	343.849.285	5.148.302	7	3	0	2	1	
	Jumlah	308	1.961.876.782	39.662.660	137	59	50	18	44	

Sumber : Data diolah dari LPLPD Kab. Tabanan, 2021

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 telah terjadi penurunan laba dan tingkat kesehatan pada LPD di Kabupaten Tabanan dari 308 LPD tersebut, sejumlah 137 LPD tergolong sehat, hal ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mana LPD yang tergolong sehat sejumlah 149 LPD. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah LPD yang kurang sehat, tidak sehat, jumlah ini lebih besar dari tahun 2020. Terjadinya peningkatan LPD macet ini karena permasalahan kredit macet, banyaknya kasus kecurangan, kurangnya pengawasan internal dan eksternal, adanya sistem pengendalian internal yang lemah dan menyebabkan risiko kerugian bagi suatu organisasi, potensi SDM yang kurang (Dewi et al., 2017).

Kecenderungan kecurangan pada LPD Kabupaten Tabanan yang telah menyebabkan penurunan laba dan tingkat kesehatan LPD perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga keberlangsungan LPD Kabupaten Tabanan. Kecurangan adalah sebuah tindakan yang membuat kerugian yang dilakukan secara sengaja untuk menggunakan sumber daya LPD demi memperoleh kepentingan pribadi. Seperti yang dilakukan oleh pegawai-pegawai LPD Kabupaten Tabanan yang melakukan penggelapan untuk kepentingan pribadi.

Kecenderungan kecurangan dipengaruhi oleh berbagai factor. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan dijelaskan oleh *Fraud triangle theory*. *Fraud triangle theory* pertama kali dikemukakan oleh Cressey tahun 1953. *Triangle fraud theory* menjadi teori awal dari teori *fraud* yang lahir sekarang dan menjadi teori pertama yang mampu menjelaskan faktor-faktor seseorang yang mendorong melakukan *fraud* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Pada penelitian ini rasionalisasi

diproyeksikan dengan moralitas individu, integritas dan *Catur Purusa Artha*, kemudian peluang diproyeksikan dengan *ineffective monitoring* sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggara & Suprasto (2020), Suarniti & Sari (2020) dan Sari & Lestari (2020). Pemilihan variabel-variabel ini juga didasari oleh permasalahan yang sedang dihadapi oleh LPD saat ini.

Penelitian ini serupa dengan penelitian oleh Rahmi & Helmayunita (2019) yang berpendapat bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan. Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar. Sebaliknya, semakin rendah level penalaran moral seseorang maka kemungkinan terjadi perilaku tidak etis. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Muliana & Ryan Suarantalla, 2022) mendapat hasil jika moralitas individu mempunyai pengaruh negatif pada kecenderungan terjadinya kecurangan. Terdapat perbedaan hasil penelitian ini, membuat peneliti ingin menguji variabel ini.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecurangan yaitu Integritas. Penelitian (Lestari & Supadmi, 2017), (Damayanti & Purwantini, 2021) menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh yang negatif dan berdampak signifikan pada kecurangan. Penelitian selanjutnya oleh (N. E. Putri, 2021) menyatakan bahwa integritas memiliki pengaruh terhadap pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) akuntansi. Hal tersebut bermakna bahwa apabila integritas karyawan tinggi, maka kecurangan yang terjadi akan semakin rendah. Adanya perbedaan hasil penelitian membuat penulis ingin menguji kembali variable ini.

Variabel lainnya yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan yaitu nilai kearifan local agama hindu yang disebut *Catur Purus Arta* dimana agama Hindu

mengenal pula empat butir tujuan hidup manusia yakni *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksha*. Catur Purusartha menggariskan bahwa manusia sebagai homo faber memiliki kewajiban hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup, dengan mengikuti azas kebajikan (*dharma*). Dalam Nilai *Catur Purusa Artha* berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Krisna dkk, 2019). Namun pada kenyataannya banyak manusia yang mengejar *artha* sehingga melakukan segala cara untuk memperoleh *artha* baik itu secara positif atau negatif. Beberapa penelitian belum menggunakan nilai lokal Hindu-Bali dalam kecenderungan kecurangan sehingga dengan menggunakan nilai lokal Hindu-Bali konsep *Catur purusa artha* untuk membaca sebuah teks, maka tujuan penulisan ini untuk mengonstruksi kecenderungan kecurangan melalui perspektif *Catur purusa artha* selain itu, penelitian ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya bangsa.

Ineffective monitoring yang merupakan suatu tindak pemantauan yang tidak efektif oleh organisasi atau perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2022) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* berpengaruh positif signifikan terhadap financial statement *fraud*. Sedangkan pada penelitian Listyaningrum et al. (2017) dan Sari & Lestari (2020) menyatakan bahwa *ineffective monitoring* tidak dapat digunakan sebagai pendeteksi kecurangan karena masih lemahnya pengawasan pihak internal dan eksternal dari LPD sendiri. Hal lain yang mendasari pemilihan variabel ini adalah karena secara logika jika lemah dalam sistem pengawasan pasti akan berpeluang terjadinya kecurangan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Anggara (2020) yang berjudul “Pengaruh Integritas dan Moralitas Individu pada Kecurangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Mediasi”

penelitian ini menambahkan dua variable babas yaitu *Catur purusa arta* dan *Ineffective monitoring*. Dipilihnya variable ini karena penerapan *catur purusa arta* tidak sesuai dengan kondisi LPD, dan meluasnya kasus kecurangan dan skandal penggelapan dana membuktikan bahwa terjadinya pelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh LPD dan memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kecurangan serta terdapat ketidakconsistenan dengan penelitian terdahulu.

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang kecenderungan kecurangan pada LPD. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjawab hipotesis dari penelitian ini dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti **“PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, INTEGRITAS, CATUR PURUSHA ARTA, INEFFECTIVE MONITORING TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN PADA LPD SE-KABUPATEN TABANAN”**

1.2 Motivasi Penelitian

Penelitian ini dimotivasi oleh beberapa hal, yaitu: **Pertama**, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apa penyebab terus terjadinya tingkat kecurangan pada LPD dimana LPD Tabanan selalu menempati posisi pertama dengan jumlah terbanyak LPD yang tidak beroperasi. **Kedua**, LPD dapat terhalangi dalam mencapai visi, misi, tujuannya karena tata kelola organisasi yang kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus penggelapan pada LPD yang dilakukan oleh pihak internal LPD karena masih rendahnya moral individu dalam kehidupan sosial yang menyebabkan banyak terjadi perilaku yang menyimpang

seperti korupsi. **Ketiga**, Kurangnya Pengawasan Internal dan Eksternal pada LPD karena keterbatasan jarak. **Keempat**, Adanya konflik kepentingan dalam LPD seperti pemilihan pengurus LPD yang tidak rasional sehingga peluang ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. **Kelima**, Terdapat perbedaan terhadap hasil dari penelitian-penelitian terdahulu pada variabel yang digunakan seperti moralitas individu, integritas, dan *Ineffective monitoring*.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil yang terfokus dan menghindari penafsiran yang tidak diinginkan atas hasil penelitian, peneliti membatasi pada faktor-faktor yang mendorong *kecenderungan kecurangan* yaitu moralitas individu, integritas, *catur purusa arta* dan *Ineffective monitoring*. Dipilihnya variabel ini untuk diteliti karena merujuk pada identifikasi masalah yang ada bahwa terdapat factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut.

1. Apakah moralitas individu berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan?
2. Apakah integritas berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan?
3. Apakah *Catur purusa arta* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan?

4. Apakah *Ineffective monitoring* berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan?
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Catur purusa arta* terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Ineffective monitoring* terhadap kecenderungan kecurangan pada LPD Se-Kabupaten Tabanan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teori

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi perkembangan teori khususnya yang berkaitan dengan fraud yang didasari *teori triangle*. Dengan penambahan variabel *catur purusa arta* dan *ineffective monitoring* diharapkan mampu menjelaskan mengenai fenomena kecurangan. Pada penelitian ini juga berpengaruh pada mata kuliah akuntansi forensic yang menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan.

1.6.2 Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan LPD Akuntan Publik di untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak manajemen LPD dan LPLPD untuk dapat menurunkan tingkat kecurangan pada LPD.

1.7 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar dalam penelitian ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi penelitian bisa disebut dengan anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Jadi asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, integritas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, *catur purusha arta* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan.

1.8 Rencana Publikasi

Penelitian ini akan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) – S2.